

KK
Pa 14/02
Nin
a

SKRIPSI

NOVITA NINGTYASTUTI

ABORTUS PROVOCATUS PADA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN (DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1992)



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

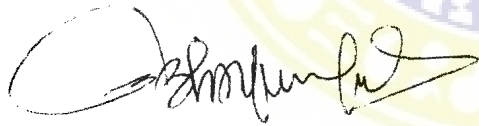
**ABORTUS PROVOCATUS
PADA KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN
(DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG No. 23 TAHUN 1992)**

SKRIPSI

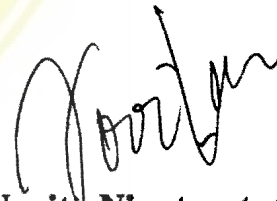
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 390



Novita Ningtyastuti
NIM. 039814660

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari seluruh wawasan dan analisa di atas, akan diketengahkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini:

- a. Abortus merupakan masalah yang bersifat universal karena sangat berkaitan dengan masalah kesehatan wanita, oleh karenanya harus dilakukan di Rumah Sakit dan dilakukan oleh orang yang mengerti kesehatan. Dengan dilakukannya abortus provocatus sering menimbulkan komplikasi sedangkan penyakit yang mempengaruhi keselamatan / kesehatan wanita hamil meliputi penyakit jantung, kanker genetalia, hipertensi berat, gagal ginjal, hepatitis, dan lain-lain.
- b. Permasalahan abortus provocatus bukan saja merupakan masalah profesi kedokteran semata, melainkan campur tangan hukum pun tak dapat dihindari. Fungsi hukum adalah untuk menjamin stabilitas dan kepastian hukum, tetapi pada abortus provocatus pada kehamilan akibat perkosaan, keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi di atas :

1. Mengingat banyaknya kasus perkosaan yang terjadi, diharapkan masyarakat khususnya kaum wanita agar berhati-hati, misalnya jangan suka memamerkan anggota tubuh yang dapat merangsang nafsu biologis seseorang, jangan berjalan sendirian di tempat yang rawan dan sepi apalagi di malam hari. Keadaan yang demikian dapat mendorong seseorang untuk melakukan pemerkosaan.
2. Dalam kasus abortus provocatus bagi korban perkosaan, peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan memegang posisis yang amat penting. Pemerintah harus pro aktif terhadap fenomena yang berkembang dimasyarakat. Pembentuk undang- undang harus mempertimbangkan sebab akibat dari kehamilan yang disebabkan karena perkosaan. Kehamilan akibat perkosaan berakibat lebih buruk bagi korban perkosaan yang bersangkutan jika diteruskan. Oleh karena itu demi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sudah seharusnya kalau pertimbangan-pertimbangan itu diformulasikan dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang akan datang. Paling tidak mulai sekarang hakim harus memperhatikan pertimbangan khusus tersebut dalam menjatuhkan pidana atas perkara abortus provocatus bagi korban perkosaan yang hamil.